



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI, adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, antara lain fungsi legislasi (perundang-undangan), fungsi budgeting (anggaran), fungsi kontrol (pengawasan) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPR RI masa reses persidangan II tahun sidang 2019-2020, yang pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada DPR RI, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi II DPR RI akan melakukan pertemuan sekaligus dialog dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Selatan beserta para pejabat SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi II DPR RI juga akan mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa topik yang akan menjadi perhatian Komisi II DPR RI terkait kunjungan kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.
- b. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di wilayah provinsi Sulsel, serta upaya yang telah dilakukan dan hambatan yang dihadapi pemerintah provinsi Sulsel dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dana desa.

- c. Hasil evaluasi dan perkembangan terakhir dari pelaksanaan program KTP elektronik di wilayah Provinsi Sulsel.
- d. Tindak lanjut terhadap beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penegasan batas wilayah di Provinsi Sulsel.
- e. Persiapan Pilkada Serentak tahun 2020; yaitu terkait persiapan dan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menghadapi agenda nasional ini, dan bagaimana koordinasi dengan pihak penyelenggara serta pihak keamanan.

Catatan:

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di wilayah Provinsi Sulsel akan berlangsung di 12 kabupaten/kota, yaitu :

- Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Kabupaten Barru
- Kabupaten Gowa
- Kabupaten Maros
- Kabupaten Soppeng
- Kabupaten Luwu Timur
- Kabupaten Luwu Utara
- Kabupaten Bulukumba
- Kabupaten Tana Toraja
- Kabupaten Kepulauan Selayar
- Kabupaten Toraja Utara
- Kota Makassar

2. Pertemuan dengan BPN Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis BPN Sulsel, yang meliputi PTSL, Redistribusi, Pensertifikatan BMN, IP4T, dan sertifikat lintas sektor;
- b. Perkembangan penanganan berbagai kasus pertanahan di wilayah Provinsi Sulsel;
- c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran, dan pemetaan; dan.
- d. Masalah ketataruangan

3. Pertemuan dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Persiapan dan kesiapan dari KPU Provinsi Sulsel dan KPU Kab/Kota dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan diselenggarakan pula di wilayah Provinsi Sulsel (11 kabupaten dan 1 kota), termasuk tahapan dan kegiatan yang telah dilaksanakan sejauh ini.

4. Pertemuan dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Persiapan dan kesiapan dari Bawaslu Provinsi Sulsel dan Bawaslu Kab/Kota dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan diselenggarakan pula di wilayah Provinsi Sulsel (11 kabupaten dan 1 kota), termasuk tahapan dan kegiatan yang telah dilaksanakan sejauh ini, serta koordinasi dalam lingkup Gakkumdu.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan ini berjumlah 12 orang anggota yang dipimpin oleh Yth. **Bpk. Arif Wibowo** dari **Fraksi PDIP** dan anggota Tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGT	N A M A	KETERANGAN

1.	A-210	Arif Wibowo	Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI/F- PDI-P
2.	A-263	Komarudin Watubun, SH,MH	Anggota/F- PDI-P
3.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/F- PDIP
4.	A-219	Johan Budi Supto Pribowo	Anggota/F- PDIP
5.	A-315	Zulfikar Arse Sadiki, S.IP.,M.Si	Anggota/F-PG
6.	A-308	Teti Rohatiningsih, S.Sos	Anggota/F-PG
7.	A-80	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc	Anggota/F-Gerindra
8	A-366	Drs. Tjejep Muchtar Soleh, MM	Anggota/F- Nasdem
8.	A-386	Kristiana Muki, S.Pd.,M.Si	Anggota/F- Nasdem
9.	A-428	H. Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/F- PKS
10.	A-518	Mitra Fakhruddin MB	Anggota/F- PKB
11.	A-422	DR. H. Mardani Ali Sera	Anggota/F- PAN
12.	A-520	John Siffy Mirin	Anggota/F- PAN

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, TV Parlemen dan Pemberitaan DPR RI

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, para Ketua KPU dan Bawaslu dari 12 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, Kanwil BPN RI Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan.

C. HASIL KUNJUNGAN

I. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Perkembangan terakhir dari program KTP elektronik di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

Penerapan program KTP el di Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini terbilang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari progress kepemilikan KTP el sesuai Data Konsolidasi Bersih Semester II 2019 yang diterbitkan pada bulan Februari 2020 sebesar 6.062.519 jiwa (94,39%) dari total wajib KTP el 6.422.849 jiwa.

2. Jumlah dan presentasi perekaman

Adapun jumlah perekaman di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai data Demographic terakhir yang diterbitkan telah mencapai 6.300.395 jiwa (98.08%) dari 6.422.849 jiwa wajib KTP el.

3. Jumlah presentase pencetakan KTP el

Adapun presentase pencetakan KTP el di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 94,39% yang meliputi:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| a. Kepulauan Selayar 92,43% | m. Wajo 100% |
| b. Bulukuma 97,83% | n. Sidenreng Rappang 96,24 % |
| c. Bantaeng 95,57% | o. Pinrang 97,98 % |
| d. Jeneponto 84,28% | p. Enrekang 93,21 % |
| e. Takalar 100% | q. Luwu 94,20% |
| f. Gowa 94,45% | r. Tana Toraja 78,21% |
| g. Sinjai 100% | s. Luwu Utara 91,69% |
| h. Bone 94,03% | t. Luwu Timur 96,76% |
| i. Maros 89,74 % | u. Toraja Utara 100% |
| j. Pangkajene Kepulauan 94,50% | v. Kota Makassar 93,93% |
| k. Barru 100% | w. Kota Parepare 100% |
| l. Soppeng 99,47% | x. Kota Palopo 87,34% |

4. Pendistribusian KTP el yang telah dilaksanakan masing-masing di Kabupaten/Kota:

Pendistribusian blanko KTP el di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya bergantung pada ketersediaan blanko KTP el di pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hal ini juga berlaku secara Nasional. Hingga tahun 2020 ini pendistribusian blanko KTP el khususnya di Sulawesi Selatan telah berjalan secara efektif dan lancar. Hanya saja pendistribusian tersebut masih diprioritaskan pada wajib KTP el yang baru melakukan perekaman.

5. Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai urusan adminduk:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui OPD yang menangani urusan administrasi kependudukan terus melakukan koordinasi bersama KPU Provinsi terkait pemutakhiran data pemilih yang ada di 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan monitoring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada Serentak, khususnya mengenai kesiapan data dan konsolidasi data wajib pilih di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020.

6. Kendala yang dihadapi saat ini

- adapun kendala yang dihadapi meliputi:

- a. ketersediaan blanko KTP el masih memprioritaskan kepada penduduk yang baru melakukan pencetakan pertama, adapun penggantian maupun perubahan mengikuti pada ketersediaan jumlah blanko yang dimiliki oleh Kab/Kota

b. Kabupaten/Kota diminta agar menganggarkan biaya pengadaan blanko KTP el di APBD masing masing Kab/Kota sesuai kebutuhan yang kemudian akan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat

c. Proses pendistribusian blanko KTP el yang harus dijemput langsung oleh masing-masing Kab/Kota, sehingga diperlukan anggaran tambahan, mengingat sekali penjemputan via udara secara berkesinambungan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

d. Seiring terjadi oerbedaan data antara data Pelayanan yang ada di Kabupaten/Kota dengan data Konsolidasi yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri.

e. Berkaitan dengan Pilkada Serentak, sebagaimana hasil monitoring di Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 diperoleh informs bahwa KPU yang ada di Kabupaten/Kota masih kurang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait data yang akan dikonsolidasikan atau dimutakhirkan.

II. KPU DAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Jumlah NPHD 12 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada:

NO	KPU Kab.Kota	Jumlah Anggaran (NPHD)	Tanggal Pelaksanaan
1	Luwu Utara	Rp. 30.300.000.000,-	26 September 2019
2	Gowa	Rp. 60.006.006.100,-	29 September 2019
3	Luwu Timur	Rp. 30.600.000.000,-	30 September 2019
4	Toraja Utara	Rp. 30.850.300.000,-	30 September 2019
5	Bulukuma	Rp. 27.583.000.000,-	1 Oktober 2019
6	Makassar	Rp. 78.000.000.000,-	1 Oktober 2019
7	Tana Toraja	Rp. 29.999.962.000,-	1 Oktober 2019
8	Barru	Rp. 20.777.872.000,-	5 Oktober 2019
9	Soppeng	Rp. 25.290.000.000,-	7 Oktober 2019
10	Maros	Rp. 31.173.820.700,-	14 Oktober 2019
11	Selayar	Rp. 22.000.000.000,-	4 November 2019
12	Pangkep	Rp. 25.000.000.000,-	11 November 2019

2. Bentuk Sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada pemilih pemula) terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di KPU Kabupaten Luwu Utara, yaitu:

1. KPU go to school
2. KPU go to campus
3. Cerdas Cermat Pilkada antar SMA sederajat
4. Tatap muka dengan komunitas

3. Pelaksanaan Perekrutan PPK saat ini sudah pada tahapan pengumuman calon Anggota PPK terpilih pasca masukan/tanggapan masyarakat tahap II tanggal 29 Februari 2020 akan dilakukan pelantikan anggota PPK se Kabupaten Luwu Utara.

Kendala yang dihadapi dalam rekrutmen PPK:

1. Dalam hal persyaratan tidak terlibat partai politik/tim kampanye, banyak masyarakat bahkan ada beberapa dari mantan penyelenggara ad hoc yang keberatan karena keberadaan nama mereka di SIPOL hanya dicatut tanpa sepengetahuan mereka sehingga tidak bisa lagi mendaftar sebagai penyelenggara ad hoc

2. Persyaratan yang membolehkan Pendaftar menggunakan Surat Keterangan Domisili, memungkinkan calon dari kecamatan/desa lain yang mendaftar karena surat keterangan domisili sangat mudah didapatkan.

3. Perlu diatur mengenai persyaratan bagi calon PPK yang memiliki pekerjaan tetap seperti ASN/Pegawai Swasta atau Aparat Desa/BPD sehingga dapat tetap fokus melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara ad hoc tanpa mengganggu rutinitas pekerjaannya.

4. Untuk Kabupaten Luwu Utara tidak ada bakal calon perseorangan yang melakukan pendaftaran

5. Terkait pemutakhiran data dan daftar pemilih:

a. Kendala utama pemutakhiran data pemilih ada di dinamika kependudukan itu sendiri. Dinamika perpindahan penduduk yang membutuhkan koordinasi yang baik dengan Disdukcapil.

b. Pemetaan pemilih pemula berbasis DP 4, selain itu factual untuk mengetahui kepemilikan KTP el.

6. Hal-hal yang menjadi perhatian khusus

a. Juknis/materi untuk keperluan pengadaan agar dikeluarkan lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan pengadaan Logistik di tingkat Kabupaten sehingga distribusi logistic bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

b. Perlunya mengatur standar biaya transportasi untuk pendistribusian logistik khususnya untuk remote area dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau

c. Regulasi pencalonan regulasi dan petunjuk teknis itu seharusnya sudah final sebelum proses pendaftaran pasangan calon

d. Server untuk rekapitulasi Tungsura agar ditingkatkan untuk menunjang aplikasi situng.

NPHD sudah berjalan sesuai tahapan, meskipun ada kendala komunikasi dengan Pemda, 2 Kab/Kota sampai dibahas di mendagri dikonsultasikan ke Mendagri, yaitu Kab. Pangkep dan Selayar, dana yang diberikan kurang proposional, setelah dibawa ke

Mendagri 2-3 kali pertemuan akhirnya KPU menerima. Ada 3 Kab/Kota yang kekurangan anggaran, Kab Pangkep, Kab. Selayar dan Kab. Bulukumba.

NPHD Kab lain dengan informasi calon perseorangan tidak ada, Selayar dan Maros (calon perseorangan) 10 Kab/Kota kalau ada kekurangan bisa direvisi dan secara umum dapat berjalan dengan baik.

Kekurangan anggaran yang menjadi masalah: pada program sosialisasi di beberapa Kab/kota sudah mengurangi habis, di Kab Pangkep membentuk relawan demokrasi tetapi anggarannya rendah sehingga berpotensi tidak terbentuk.

Anggaran pilkada yang tersedia dianggap kurang, maka yang paling berpotensi dipotong awal adalah sosialisasi (makan-minum).

Sosialisasi sudah akan dilakukan berbagai macam cara, yang paling efektif adalah relawan demokrasi untuk kecamatan dan desa. Aktif pula melakukan kegiatan go to school dan go to campus. Dapat dimaksimalkan di beberapa hal, walaupun tidak ada anggaran tetapi tetap dapat dilakukan, seperti go to school dan rapat di kecamatan dan desa. Melakukan tatap muka (konsekuensi anggaran),

Pada proses pelaksanaan selesai PPK di bulan Februari PPK sudah dibentuk, proses pelaksanaan rekrutmen PPK sudah dilaksanakan, tes CAT dan wawancara, Proses penyelenggara ad hoc

Pemutakhiran data pemilih, DP4 masih proses sinkronisasi, belum sampai k KPU Kab/Kota, sudah melakukan berbagai macam kegiatan E cokolit disiapkan oleh KPU Kota Makassar sedang dipresentasikan di KPU RI

Mengenai jalur perorangan terdapat di Kabupaten Selayar, Maros dan Makassar.

KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan:

NPHD sudah selesai meskipun 3 kali diundang Kemendagri, disepakati sejumlah 25 M, sosialisasi dikurangi dari 800 juta menjadi 200 juta, anggaran makan minum dikurangi jadi 43 ribu menjadi 17 ribu, snack jadi 10.000. Mengakibatkan tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lain lagi

Honor ad hoc sudah sesuai dengan SE KPU RI.

Relawan Demokrasi sudah tidak bisa diadakan lagi karena sudah tidak ada anggaran, sedangkan relawan demokrasi sangat diperlukan mengingat pengawalan pencoblosan KPU harus menginap di lokasi mengingat medan lokasi yang sangat jauh.

KPU Kabupaten Selayar

Tidak sesuai dengan usulan awal yang mengadakan perubahan sesuai dengan SE Kemenkeu.

Selayar ada calon perorangan, verifikasi administrasi hanya ada 1 pasang,

KPU Kabupaten Bulukumba

Penandangngan NPHD tepat waktu, honor adhoc tidak masuk, surat kemenkeu terbit setelah NPHD terbit bersama, kekurangan honor ad hoc sekitar 5 M, setelah duduk bersama untuk pergeseran sudah dilakukan tetapi Pemerintah Daerah meminta bertemu kembali setelah tidak ada calon perorangan.

Pemda hanya memberikan 1 M (PPK dan PPDP), yang 4 M untuk (PPS dan KPPS). Bupati ingin melakukan rapat kordinasi tetapi belum ada solusi

KPU Kota Makassar

NPHD Kota Makassar tidak ada permasalahan serius, 94 menjadi 78 M, penyesuaian honor ad hoc masih ada kekurangan 9,6 M, respon positif tetapi tidak masuk dalam tahun anggaran. Penyelenggara Ad hoc diasuransikan, namun yang tidak ad hoc belum ada asuransi.

KPU Kabupaten Luwu Utara

Satu komisioner meninggal dunia (harus segera ada penggantinya). Mekanisme penggantian di tingkat kab/kota sebaiknya jangan melalui pusat (cukup provinsi).

BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Jumlah Anggaran Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan

Terkait jumlah anggaran Pilkada di 12 Kabupaten/Kota berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara keseluruhan berjumlah Rp. 124.153.503.800,00 (seratur duapuluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) rincian per kabupaten/kota. Kendala yang terjadi sebagian Kabupaten/Kota pada pencairan. Adanya Pemda yang tidak konsisten dengan Permendagri yang mengatur pencairan 40%, 50% dan 10%

Alokasi Anggaran Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan

1. Kota Makassar	= Rp. 18.919.040.000,00
2. Kab. Pangkep	= Rp. 8.600.000.000,00
3. Kab. Gowa	= Rp. 11.018.430.000,00
4. Kab. Maros	= Rp. 24.400.000.000,00
5. Kab. Barru	= Rp. 6.942.664.800,00
6. Kab. Bulukumba	= Rp. 7.073.153.000,00
7. Kab. Soppeng	= Rp. 7.724.376.000,00
8. Kab. Luwu Utara	= Rp. 13.086.567.800,00
9. Kab. Luwu Timur	= Rp. 9.926.418.650,00
10. Kab. Tana Toraja	= Rp. 950.000.000,00
11. Kab. Toraja Utara	= Rp. 9.950.000.000,00
12. Kab. Selayar	= Rp. 21.500.000.000,00

2. Pelaksanaan Rekrutmen Pengawas Ad Hoc

Rekrutmen Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) dilaksanakan dengan menggunakan system Computer Assisted Test (CAT) sebagai suatu metode seleksi untuk mendapatkan standar kompetensi pelamar. Sistem ini relative meningkatkan kepercayaan peserta dan publik terhadap hasil tes. Dari rekrutmen ini telah terbentuk sebanyak 486 orang Panwascam di 12 Kabupaten/Kota. Kendala selain

persyaratan yang dianggap berat bagi calon Panwascam juga banyak yang memilih menjadi bagian dari Pasangan Calon (Paslon)

Pelaksanaan perekrutan Panitia Pengawas (Panwas) Kelurahan dan Desa sedang berlangsung. Ada beberapa kelurahan dan desa yang masa pendaftaran diperpanjang karena belum memenuhi kuota. Diharapkan prosesnya lancar sehingga akan terpilih sebanyak 1485 orang Pengawas Kelurahan dan Desa. Setelah Panwas Kelurahan dan Desa terpilih, jajaran pengawas Pilkada akan merekrut sebanyak 14.492 orang Pengawas TPS (PTPS).

3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A via Daring (online)

Bawaslu Kabupaten/Kota telah rutin mengirimkan LHP Form A via online ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, selain tetap mengirim secara manual setelah pengawasan tahapan, maupun secara mingguan, kemudian direkap di provinsi. Salah satu manfaat via online setiap kasus terpantau progress penanganannya.

4. Indeks Kerawanan Pilkada (IKP)

IKP di Sulawesi Selatan yang termasuk kategori rawan tinggi adalah kota Makassar, selebihnya rawan sedang. Dari hasil pemetaan IKP tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Kabupaten/Kota mengintensifkan diskusi terfokus sesuai dimensi yang berpotensi terjadinya pelanggaran. Langkah lainnya adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga dan mengefektifkan pencegahan.

5. Pengalaman

Pengalaman pada Pemilu 2019 selain melakukan seperti yang ada pada point 4 diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya ke bawah melakukan respon cepat sehingga setiap masalah segera ditangani sehingga adanya kepastian hukum.

Bawaslu Kab. Pangkajene Kepulauan

NPHD di Kab. Pangkep yang agak bermasalah sehingga harus dikonsultasikan dengan Mendagri. Minimnya anggaran menjadikan kegiatan sosialisasi tidak maksimal

Pencairan NPHD juga masih bermasalah di Maros

Rekrutmen untuk PPL terkendala oleh aturan yang ketat, misalnya persyaratan minimum tingkat pendidikan.

Tingkat kerawanan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu hanya di kota Makassar.

Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan terakhir mendapatkan sebagai Gakkumdu terbaik di Indonesia, 34 kasus vonis di pengadilan tertinggi seluruh Indonesia, angka tersebut justru mencerminkan Bawaslu Sulsel gagal melakukan pengawasan

Pilkada 2018 ada 1 yang didiskualifikasi, 2 kalah di MA dan 1 in kracht.

Langkah Bawaslu Sulsel dalam rangka menjaga netralitas ASN adalah Menyurati semua instansi agar ASN tetap netral

Bawaslu Kabupaten Maros

14 kecamatan, kelurahan 103, anggaran dalam proses NPHD tidak ada persoalan serius, hanya saja sampai saat ini NPHD belum cair dan sudah lewat 14 hari dari NPHD tahap pertama, pilkada 2015 bahkan Pilkada sudah selesai baru dicairkan. Alasan saat ini belum dapat dicairkan karena:

- penawaran kemanan belum masuk mau mencairkan sekaligus
- SK dari pengelola hibah Bupati belum dittd dengan alasan yang selalu berubah-ubah.

Honor panwascam juga belum dibayar honorinya

Pertanyaan dan Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI:

Yth. Johan Budi Sapto Pribowo:

Di Kabupaten Sidoarjo ada peningkatan dari NPHD dari 45 M menjadi 75 M, sedangkan di Kabupaten Pangkep sampai perlu diselesaikan di Mendagri, apakah ada mekanisme dana dibantu provinsi

Bagaimana sampai bisa mendiskualifikasi calon, karena kalau ada pelanggaran biasanya mentok di Gakkumdu.

Yth. Sodik Mujahid

Informasi tentang incumbent, karena sering terkait dengan netralitas ASN, antisipasi keamanan.

Yth. Ir. Hughua

Sosialisasi ke panitia ad hoc atau masyarakat, NPHD 4,4 M ke tim adhoc, RDP dengan Mendagri yang memungkinkan KPU Bawaslu rembuk lagi dengan Bupati/Walikota nya karena honor adhoc menjadi penting mengingat kemarin banyak yang meninggal.

Yth. Teddy Setiadi

Honor ada yang sudah disesuaikan ada yang belum, banyak yang belum disesuaikan dari SE Menkeu. NPHD sudah ditandatangani ada Kewajiban dari pemda, ada perubahan NPHD harus ada komunikasi, harus dikomunikasikan dengan Pemda dan DPRD, tetapi jarang terjadi pergeseran, karena apa yang sudah ditandatangani itu yang dijalankan oleh Pemda.

Yth. Mitra Fakhruddin

Para KPPS yang menjadi korban diharapkan tidak terjadi lagi, calon tunggal, Pilkada calon tunggal, perlu diatur bagaimana dengan kotak kosong termasuk kampanye kotak kosong,

Jawaban KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam proses pembahasan NPHD harus selesai di Kab/Kota, kalau mau revisi harus jelas item mana yang direvisi, hasil konsultasi dengan kemendagri hasilnya kurang memuaskan. Di Kabupaten Pangkep sosialisasi jauh dari maksimal, relawan demokrasi tidak bisa diadakan.

Harus diantisipasi anggaran PSU, anggaran PSU dikembalikan ke Pemda, karena medan tempuh yang sangat jauh dan hanya diberi waktu 3 hari.

Sosialisasi penting karena mencakup:

1. Syarat menjadi pemilih
2. Terdaftar menjadi pemilih
3. Bagaimana mendorong pemilih untuk datang ke TKP
4. Bagaimana mekanisme pemilihan.

Penyesuaian anggaran selalu anggaran sosialisasi dikurangi, revisi bukan menambahkan tetapi hanya memindahkan anggaran.

Usulan anggaran 8 paslon menjadi 4 paslon saja, kalau lebih dari 4 paslon, kemendagri mengarahkan agar meminta lagi tambahan anggaran kepada Bupati.

Bawaslu Kabupaten Pangkep:

Proses NPHD 3 kali negosiasi di kemendagri, hasilnya dipaksa untuk cukup, sosialisasi pengawasan 4 kali menjadi 1 kali. Pelantikan panwascam Bupati tanya berapa kali Bimtek berapa kali (hanya 1 kali)

Sebelum penandatanganan NPHD tidak ketemu, dan penandatanganan sepihak, NPHD diminta di tanda tangan setelah Bupati tandatangan Bawaslu diminta tetapi menolak.

Di Kabupaten Pangkep, ada 3 pulau dan 1 desa, regulasi UU diberikan 1 PPL, PPDP per TPS, Bawaslu tidak sanggup mengejar karena kekurangan anggaran dengan medan tempuh yang berat

NPHD 11,4 disetujui 8,6

Ada Pejabat kemendagri mengatakan kalau tidak ada sosialisasi maka Pilkada jalan terus dan dikatakan juga 'sudah berapa kali Pilkada masa tidak ngerti ngerti'.

Bawaslu Kota Makassar:

Pengangkatan Tenaga Kontrak (program DPRD Kota)

Penggunaan tagline 2 kali (ada dalam RPJMD)

Pembagian smart phone (Sudah diprogramkan sejak tahu 2016 berjalan hingga tahun 2017)

Suket : Keterangan sudah melakukan perekaman, karena KTP belum terbit, karena blanko KTP tidak ada (UU 23/2014)

Korban KPPS: 20 orang ada yang cacat fisik sampai permanen di tingkat KPPS

Tahun 2020 ini diharapkan tidak separah itu karena pilkada tidak serumit pemilu, dan lebih selektif dalam rekrutmen PPS dan KPPS, memperhatikan kondisi kesehatan

Mohon pengaturan mengenai Kotak kosong, karena tidak diatur dalam UU.

III. KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Target dan Realisasi Kegiatan Strategis BPN Sulsel untuk PTSL, Redistribusi, Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN), Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)

a. PTSL tahun 2020:

Target Pendaftaran Bidang Tanah : 333.500 bidang realisasi 12,00%

Target Sertipikat Hak atas Tanah : 131.300 bidang realisasi 00,00% (sementara proses lanjutan)

b. Redistribusi, BMN dan IP4T Tahun 2020:

Target Pendaftaran Bidang Tanah : 32.000 bidang realisasi 09.01%

Target Sertipikat Hak atas Tanah : 32.000 bidang realisasi 00,00% (sementara proses lanjutan)

2. Hambatan, Kendala dan Masalah dalam pelaksanaan PTSL, Redistribusi tanah, BMN dan IP4T

PTSL:

- a. Partisipasi masyarakat secara umum dalam melakukan pemasangan tanda batas belum optimal seiring dengan percepatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang diselesaikan pada semester pertama tahun anggaran
- b. Terdapat sejumlah masyarakat tidak bertempat tinggal di lokasi PTSL (berada diluar kota/kabupaten/Negara) sehingga menyulitkan untuk melengkapi persyaratan yuridis.
- c. Kurang aktifnya masyarakat dalam melengkapi alas hak (dasar penguasaan) dengan petugas puldadi
- d. Dengan berlakunya SKB 3 Menteri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, dalam hal ini masyarakat terbebani biaya sehingga tidak bersedia menjadi peserta PTSL
- e. Terhadap BPHTB yang terutang, ada kekhawatiran dari Pemerintah Daerah apabila dilakukan dengan stempel BPHTB terutang, PAD nya akan berkurang
- f. Untuk kegiatan PTSL pulau:
 - kondisi cuaca menyulitkan petugas puldasik dan puldadis untuk ke lokasi
 - letak pulau-pulau sangat berjauhan, dimana terdapat pulau yang berbatasan dengan Pulau Lombok dan Pulau Kalimantan (khusus untuk Kabupaten Pangkep);
 - sebagian besar masyarakat yang tinggal di kepulauan, belum mempunyai alas hak (dasar penguasaan)
 - Masih terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum valid.

Redistribusi:

- a. Proses rekomendasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk lokasi yang akan disertipikatkan terlalu lama
- b. Lokasi yang berbatasan dengan Kawasan Hutan (tidak masuk dalam Kawasan Hutan) dianggap bermasalah dan tidak bisa ditindaklanjuti
- c. Belum ada lokasi Redistribusi dari objek TORA (BPKH, HGU habis)

Barang Milik Negara (BMN):

- a. Kesulitan mencari data pendaftaran tanah yang dimiliki oleh instansi dan badan usaha pemerintah
- b. Belum dilakukannya Pemantauan dan Evaluasi terhadap Hak Pakai Instansi Pemerintah
- c. Data terkait informasi pemanfaatan tanah instansi dan badan usaha pemerintah masih berbentuk hardcopy

IP4T:

Masih ditemukannya pelaksanaan kegiatan IP4T yang menyebar, sehingga kegiatan IP4T sebaiknya dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang dapat mewujudkan Inventarisasi secara sistematis pada lokasi yang ditetapkan

Lintas Sektor (lintor)

- Perekrutan kegiatan sertipikasi Lintor belum matang mengingat sering beruang penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL) sertipikasi bidang tanah yang tidak terintegrasi dengan penetapan lokasi kegiatan PTSL 2019
- Partisipasi instansi yang membutuhkan kurang optimal, mengingat seringkali tim tidak bersamaan dalam menyusun jadwal pada tahapan proses penerbitan sertipikat.

3. Jumlah Sengketa, Kasus dan Perkara yang belum terselesaikan

Sengketa : 121 kasus
Konflik : 0 konflik
Perkara : 300 perkara

Hambatan dan kesulitan penyelesaiannya:

- a. masih terdapat surat pengaduan yang berulang pada obyek sengketa konflik perkara yang sama
- b. masih kurang jumlah SDM yang menguasai hukum pertanahan secara handal

- c. terdapat kasus yang menjadi obyek pada peradilan terhadap tanah bersertipikat dimana BPN tidak menjadi pihak.

4. Perkembangan Peta Dasar Pertanahan:

- Cakupan ketersediaan Peta Dasar Pertanahan telah 100% di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu peta Citra Global Base MAP BPN RI Tahun 2013. PDP yang berupa Peta Citra/Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) update yang ditegaskan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sampai tahun 2019 telah mencakup luasan \pm 300.000 Ha. Meliputi Kabupaten Gowa, Jeneponta, Kab. Bantaeng dan Kab. Slnjai
- Dalam rangka mewujudkan percepatan mewujudkan percepatan kebijakan one map policy kiranya Peta Dasar Pertanahan yang ditegaskan oleh BIG menjadi acuan utama dalam mewujudkan kota lengkap, sehingga cakupan ketersediaan PDP berupa CSRT skala 1:1000 diharapkan mutlak 100% pada tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan

5. Tematik:

Kegiatan Pemetaan Tematik dilaksanakan secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018. Kabupaten Maros menjadi lokus kegiatan pemetaan tematik pada tahun 2018 yang dilanjutkan di Kabupaten Gowa pada tahun 2019 dan tahun 2020 di Kota Makassar.

Pemetaan tematik skala 1:5000 di Kota Makassar dengan volume 15.000 Ha menjadi target kegiatan pemetaan tematik tahun 2020. Kegiatan Pemetaan dilaksanakan pada 7 (tujuh) tema peta yaitu:

1. Penggunaan Tanah;
2. Administrasi dan Tempat Penting;
3. Pemanfaatan Tanah;
4. Pemilikan Tanah;
5. Tanah Aset Pemerintah;
6. Hak Tanggungan;
7. Permasalahan Pertanahan.

Output kegiatan peta tematik selain menghasilkan peta tematik digital dan analog, hasil peta tematik akan dikembangkan menjadi aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti Sistem Informasi Bidang Tanah dan Sistem Informasi Masalah Pertanahan di Kota Makassar. Sistem informasi tematik dimaksudkan akan meminimalisir keterlibatan mafia tanah dan memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan pertanahan di Kota Makassar.

6. Hambatan dalam pelaksanaan Survey Pengukuran dan Pemetaan dari segi SDM, peralatan dan aspek lainnya

- Ketersediaan sumber daya petugas ukur yang terbatas baik pada kompetensi terampil dan ahli, hal ini menjadi prioritas mengingat kebutuhan operasional pelaksana pada tahap perencanaan, pelaksana maupun pengawasan mutu Survey Pengukuran dan Pemetaan

- Dalam mewujudkan Kota/Kab lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Roadmap menuju Sulawesi Selatan lengkap 2025, direncanakan target tahun 2021 pengukuran batas bidang tanah sebanyak 1,3 juta bidang dengan memperhatikan ketersediaan alat saat ini sebanyak 188 GNSS dan sumber daya manusia sebanyak 259 petugas ukur, masih dibutuhkan tambahan alat ukur sebanyak 72 set unit GNSS dan petugas ukur 41 orang

Catatan:

Kinerja optimal survey pengukuran dan pemetaan = 30 bidang/hari/Petugas ukur dengan hari kerja 150 hari.

- Ketersediaan update Peta Dasar CSRT BIG belum 100% di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Kondisi saat ini Peralatan dan SDM Petugas Ukur di Provinsi Sulawesi Selatan:

Jumlah Petugas Ukur 259 Orang terdiri dari:

ASN : 153 orang

SKB : 106 orang

Jumlah Peralatan Ukur 188 Unit GNSS

7. Isu Strategi Perwilayahan di Provinsi Sulawesi Selatan:

- a. Masih terjadinya sengketa dan konflik antar-sektor dan antar-wilayah terkait dengan batas administrasi wilayah;
- b. Adanya penurunan daya dukung lingkungan akibat penyimpangan pemanfaatan ruang, di darat dan laut
- c. Masih terdapat area penguasaan masyarakat (perkampungan desa) yang belum terinventarisasi untuk dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi area budidaya dan sampai saat ini belum menemukan solusi
- d. Pengelolaan data base spasial penunjukan kawasan hutan yang belum akurat pada saat identifikasi di lapangan sehingga masih menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar berbatasan kawasan hutan;
- e. Dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam RTRWN seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Mandiri dan KAPET;
- f. Belum terbit Revisi RTRWP dan Revisi RTRW di 24 Kabupaten/Kota;
- g. Belum ada RDTR dan Pembagian Zona pada Kawasan Ibu Kota Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- h. Masih terjadi pelanggaran alih fungsi lahan pertanian yang bersifat massif yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan minimnya pengetahuan tentang peraturan penataan ruang di daerah pertanian irigasi LP2B;

- i. Pengembangan kawasan perumahan cluster yang tumbuh secara sporadis dengan kurang memperhatikan jaringan pembuangan pengairan dan kurang memperhatikan konektivitas daya dukung jaringan jalan sehingga sering menimbulkan banjir dan kemacetan lalu lintas;

8. Formasi CPNS Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan 2019

Jumlah formasi 37 orang sebagai berikut:

- | | |
|---|------------|
| - Analisis Hukum Pertanahan | : 3 orang |
| - Analisis Keuangan | : 3 orang |
| - Analisis Pertanahan | : 3 orang |
| - Analisis Survei Pengukuran dan Pertanahan | : 3 orang |
| - Pengelola Keuangan | : 2 orang |
| - Pengelola Pertanahan | : 2 orang |
| - Pengelola Data Pengukuran dan Pemetaan | : 4 orang |
| - Petugas Ukur | : 17 orang |

Formasi 2019 di atas belum sesuai kebutuhan real pegawai di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK) tahun 2019 kebutuhan pegawai sebanyak 1855 orang dan baru terpenuhi sebanyak 828 pegawai sehingga masih kekurangan pegawai sebanyak 1027 orang.

Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga yang terkait sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Reses ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2020

Ketua Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI

Bpk. Arif Wibowo

A-210